



1. KRISIS ENERGI: APA YANG TERJADI?

- Gangguan pasokan minyak, gas, dan listrik
- Geopolitik, konflik, dan jalur distribusi terganggu
- Transisi energi belum merata dan belum matang
- Harga energi naik memicu tekanan ekonomi global

2. JALUR TRANSMISI KE INFLASI



3. DILEMA BANK SENTRAL

JIKA SUKU BUNGA DINAIKKAN

- Inflasi dan ekspektasi harga lebih terkendali
- Nilai tukar lebih stabil
- Kepercayaan pasar meningkat

RISIKONYA

- Kredit menjadi lebih mahal
- Investasi dan konsumsi melemah
- Pertumbuhan ekonomi dapat melambat

Bank sentral tidak bisa memproduksi energi, tetapi dapat menahan efek lanjutan inflasi.

4. POLITIK BANK SENTRAL

- Keputusan moneter memengaruhi rumah tangga, dunia usaha, dan pemerintah
- Stabilitas harga sering berbenturan dengan kebutuhan pertumbuhan
- Suku bunga adalah instrumen teknis yang berdampak sosial-politik
- Independensi bank sentral penting, tetapi akuntabilitas publik juga wajib

5. IMPLIKASI BAGI INDONESIA



- Rupiah sensitif terhadap gejolak global
- Subsidi energi dapat menekan APBN
- Harga pangan dan transportasi cepat memengaruhi masyarakat
- Bank Indonesia perlu menjaga stabilitas inflasi dan kurs
- Transisi menuju energi beragam dan efisien menjadi semakin penting

6. RESPONS KEBIJAKAN YANG DIPERLUKAN



7. INTI PESAN



Krisis energi memicu inflasi global, tetapi respons yang efektif harus melampaui suku bunga. Dibutuhkan sinergi antara kebijakan moneter, fiskal, energi, dan perlindungan sosial agar stabilitas ekonomi tetap terjaga tanpa mengorbankan kesejahteraan rakyat.



*Rudy C Tarumingkeng: Krisis Energi, Inflasi Global, dan Politik Bank
Sentral?*

Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Professor Emeritus, IPB-University

Anggota MPR-RI, 1982-1987

Dekan Fak. Kehutanan IPB University. 1967-1968, 1968-1971, 1977-1978

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan

Rektor, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Ketua, Dewan Guru Besar, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Ketua, Senat Akademik, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudyclt75@gmail.com

24 Juni 2026

KRISIS ENERGI, INFLASI GLOBAL, DAN POLITIK BANK SENTRAL?

Abstrak

Krisis energi, inflasi global, dan politik bank sentral merupakan tiga fenomena yang saling terkait dalam ekonomi politik kontemporer. Krisis energi tidak hanya berarti kelangkaan minyak, gas, listrik, atau batu bara, tetapi juga mencerminkan kerentanan sistem ekonomi dunia terhadap geopolitik, konflik kawasan, perubahan iklim, transisi energi, struktur pasar komoditas, dan ketergantungan rantai pasok. Ketika harga energi melonjak, biaya produksi naik, transportasi menjadi mahal, harga pangan terdorong melalui biaya pupuk dan distribusi, daya beli rumah tangga melemah, subsidi fiskal membesar, dan inflasi menjadi persoalan sosial-politik. Dalam situasi demikian, bank sentral berada pada posisi dilematis: menaikkan suku bunga untuk menahan inflasi dan menjaga ekspektasi harga, tetapi berisiko menekan pertumbuhan, investasi, lapangan kerja, serta pembiayaan sektor riil.

Pada 2026, risiko energi kembali menjadi perhatian global. World Bank memperkirakan harga komoditas keseluruhan naik 16% pada 2026, didorong terutama oleh lonjakan harga energi dan pupuk; harga energi diproyeksikan melonjak 24% ke level tertinggi sejak invasi Rusia ke Ukraina pada 2022. ([World Bank](#)) IEA dalam *Oil Market Report* Juni 2026 memperkirakan pasokan minyak global turun 3,9 juta barel per hari pada 2026 menjadi 102,4 juta barel per hari, sebelum rebound pada 2027. ([IEA](#)) IMF dalam *World Economic Outlook* April 2026 menyatakan inflasi global diproyeksikan naik secara moderat pada 2026 sebelum kembali menurun

pada 2027, sementara OECD memperkirakan inflasi G20 mencapai 4,0% pada 2026 akibat tekanan harga energi yang lebih tinggi. ([IMF](#))

Artikel ini berargumen bahwa inflasi energi bukan hanya persoalan moneter, melainkan persoalan ekonomi-politik. Bank sentral dapat menaikkan suku bunga untuk menjaga kredibilitas dan ekspektasi inflasi, tetapi ia tidak dapat memproduksi minyak, membuka pelabuhan, menurunkan harga gas, memperbaiki rantai pasok pupuk, atau langsung mengatasi konflik geopolitik. Karena itu, respons terhadap krisis energi membutuhkan bauran kebijakan: kebijakan moneter yang kredibel, kebijakan fiskal yang tepat sasaran, reformasi subsidi, diversifikasi energi, perlindungan sosial, ketahanan pangan, investasi energi terbarukan, dan tata kelola komunikasi publik. Dalam konteks Indonesia, keputusan Bank Indonesia pada 17–18 Juni 2026 menaikkan BI-Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,75% menunjukkan bahwa stabilitas nilai tukar, inflasi, dan kepercayaan pasar tetap menjadi prioritas kebijakan moneter di tengah ketidakpastian global. ([Bank Indonesia](#))

Kata kunci: krisis energi, inflasi global, bank sentral, suku bunga, kebijakan moneter, ekonomi politik, harga minyak, subsidi energi, ekspektasi inflasi, Bank Indonesia, Federal Reserve, ECB.

1. Pendahuluan

Krisis energi adalah salah satu bentuk krisis ekonomi yang paling cepat dirasakan masyarakat. Ketika harga minyak, gas, listrik, atau bahan bakar naik, dampaknya tidak berhenti pada sektor energi. Ia merambat ke transportasi, logistik, pangan, pupuk, industri, rumah tangga, belanja pemerintah, nilai tukar, inflasi, dan akhirnya stabilitas politik. Energi adalah “darah” ekonomi modern. Hampir semua kegiatan produksi, distribusi, komunikasi, mobilitas, dan konsumsi membutuhkan energi. Karena itu, guncangan energi hampir selalu menjadi guncangan sistemik.

Inflasi global dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa inflasi tidak dapat selalu dijelaskan sebagai akibat kelebihan permintaan. Inflasi juga dapat muncul dari sisi penawaran: perang, konflik geopolitik, gangguan pelayaran, embargo, kenaikan harga energi, cuaca ekstrem, kekurangan pupuk, hambatan logistik, dan perubahan struktur pasar komoditas. Inflasi jenis ini menempatkan bank sentral pada posisi yang sulit. Jika inflasi disebabkan oleh permintaan yang terlalu panas, kenaikan suku bunga relatif mudah dijelaskan: permintaan perlu didinginkan. Tetapi jika inflasi disebabkan oleh harga energi dan pangan, menaikkan suku bunga tidak langsung menambah pasokan energi dan pangan. Namun jika bank sentral tidak bertindak, ekspektasi inflasi dapat lepas kendali.

Di sinilah muncul politik bank sentral. Bank sentral sering dipandang sebagai lembaga teknokratis yang independen, rasional, dan berbasis data. Namun keputusan suku bunga memiliki dampak distribusional. Suku bunga tinggi menguntungkan penabung dan menjaga nilai mata uang, tetapi membebani peminjam, dunia usaha, pemerintah, dan rumah tangga yang memiliki kredit. Suku bunga rendah membantu kredit dan pertumbuhan, tetapi dapat melemahkan nilai tukar dan memicu inflasi jika kondisi tidak mendukung. Karena itu, kebijakan moneter tidak pernah sepenuhnya netral secara sosial dan politik.

Pada 2026, dunia kembali menghadapi tekanan energi dan inflasi. IMF menjelaskan bahwa dalam skenario referensi *World Economic Outlook* April 2026, konflik yang relatif singkat dan kenaikan energi 19% tetap cukup untuk menurunkan proyeksi pertumbuhan global dan menaikkan inflasi utama global. ([IMF](#)) OECD juga menyebut bahwa harga energi yang lebih tinggi membuat tekanan inflasi bertahan lebih lama, dengan inflasi G20 diproyeksikan lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya. ([OECD](#))

Artikel ini membahas krisis energi, inflasi global, dan politik bank sentral dalam kerangka ekonomi-politik. Fokus utamanya bukan hanya "apa yang dilakukan bank sentral", tetapi juga "mengapa keputusan bank sentral

selalu berada dalam medan konflik kepentingan antara stabilitas harga, pertumbuhan, pekerjaan, nilai tukar, APBN, dan legitimasi publik.”

2. Krisis Energi sebagai Krisis Sistemik

Krisis energi dapat muncul dalam banyak bentuk. Ada krisis pasokan ketika minyak, gas, atau listrik tidak tersedia dalam jumlah cukup. Ada krisis harga ketika energi tersedia tetapi terlalu mahal. Ada krisis distribusi ketika energi tidak sampai ke wilayah tertentu. Ada krisis fiskal ketika subsidi energi membebani APBN. Ada krisis geopolitik ketika jalur energi terganggu konflik. Ada pula krisis transisi ketika negara harus berpindah dari energi fosil ke energi bersih, tetapi infrastruktur dan teknologi belum siap.

Pada 2026, krisis energi global berkaitan erat dengan geopolitik Timur Tengah dan gangguan pasokan minyak. IEA memperkirakan pasokan minyak global turun 3,9 juta barel per hari pada 2026, dengan pasokan rata-rata 102,4 juta barel per hari, sebelum naik lagi pada 2027. ([IEA](#)) Reuters, mengutip IEA, melaporkan bahwa pasar minyak global diperkirakan mengalami surplus besar pada 2027 setelah pemulihan dari gangguan Selat Hormuz, tetapi pemulihan itu tidak terjadi seketika karena masih ada hambatan operasional dan politik. ([Reuters](#))

Krisis energi menjadi sistemik karena energi merupakan input dasar. Harga minyak memengaruhi transportasi. Harga gas memengaruhi listrik dan industri. Harga energi memengaruhi harga pupuk. Pupuk memengaruhi produksi pangan. Pangan memengaruhi inflasi. Inflasi memengaruhi upah, suku bunga, dan politik. Dengan demikian, satu guncangan di pasar energi dapat menjadi guncangan sosial yang luas.

World Bank memperkirakan harga energi pada 2026 naik 24%, sedangkan harga komoditas keseluruhan naik 16%. Lonjakan ini tidak hanya berdampak pada negara importir energi, tetapi juga pada negara berkembang yang harus menjaga harga domestik melalui subsidi atau kompensasi fiskal. ([World Bank](#))

Bagi Indonesia, krisis energi memiliki karakter ganda. Indonesia adalah produsen beberapa komoditas energi seperti batu bara dan gas, tetapi juga menghadapi kebutuhan impor minyak dan BBM tertentu. Ketika harga energi global naik, sebagian sektor memperoleh keuntungan ekspor, tetapi APBN, subsidi, inflasi, dan nilai tukar dapat tertekan. Ini menjadikan krisis energi bukan hanya persoalan ekonomi makro, tetapi persoalan desain kebijakan publik.

3. Inflasi Global: Dari Uang ke Energi, dari Pasar ke Politik

Inflasi secara sederhana adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan berkelanjutan. Dalam teori moneter klasik, inflasi sering dikaitkan dengan pertumbuhan uang yang terlalu cepat. Namun dalam kenyataan, inflasi dapat dipicu oleh banyak faktor: permintaan yang tinggi, gangguan pasokan, kenaikan upah, depresiasi mata uang, harga komoditas, ekspektasi inflasi, tarif impor, perang, dan kebijakan fiskal.

Inflasi energi memiliki ciri khusus. Pertama, ia cepat dirasakan masyarakat karena energi digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, ia mudah menyebar ke sektor lain melalui biaya produksi dan distribusi. Ketiga, ia memiliki dampak regresif: kelompok miskin menghabiskan porsi pendapatan lebih besar untuk makanan, transportasi, dan energi dasar. Keempat, ia memicu tekanan politik karena masyarakat menuntut pemerintah menahan harga.

IMF memperkirakan inflasi global naik secara moderat pada 2026 sebelum kembali menurun pada 2027. ([IMF](#)) OECD memperkirakan inflasi G20 mencapai 4,0% pada 2026 sebelum mereda pada 2027, dengan tekanan utama berasal dari harga energi yang lebih tinggi. ([OECD](#)) ECB juga merevisi naik proyeksi inflasi zona euro untuk 2026 dan 2027 karena jalur harga energi yang lebih tinggi, yang diperkirakan ikut merembes ke harga pangan, barang, dan jasa. ([European Central Bank](#))

Inflasi menjadi politik karena ia mendistribusikan kerugian. Ketika harga naik, siapa yang menanggung beban? Konsumen melalui harga lebih mahal? Pekerja melalui upah riil yang turun? Pemerintah melalui subsidi? Perusahaan melalui margin yang menyempit? Bank sentral melalui kenaikan suku bunga? Kreditur dan debitur melalui perubahan nilai riil utang? Setiap pilihan memiliki konsekuensi politik.

Inflasi juga merusak kepercayaan. Jika masyarakat percaya inflasi hanya sementara, mereka tidak akan menuntut kenaikan upah besar atau menaikkan harga secara agresif. Namun jika masyarakat percaya inflasi akan terus naik, perilaku ekonomi berubah. Pekerja menuntut upah lebih tinggi. Pedagang menaikkan harga lebih cepat. Perusahaan menyesuaikan kontrak. Ekspektasi inflasi menjadi kenyataan. Di sinilah bank sentral sangat peduli pada ekspektasi.

4. Bank Sentral: Lembaga Teknis dalam Arena Politik

Bank sentral memiliki mandat utama menjaga stabilitas harga dan stabilitas sistem keuangan. Beberapa bank sentral memiliki mandat ganda, seperti Federal Reserve yang mengejar stabilitas harga dan lapangan kerja maksimum. Bank Indonesia memiliki mandat menjaga stabilitas nilai rupiah, yang mencakup stabilitas harga dan stabilitas nilai tukar, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sesuai kerangka kebijakan yang berlaku.

Namun bank sentral tidak bekerja dalam ruang hampa. Ia beroperasi di tengah tekanan pemerintah, pasar keuangan, pelaku usaha, pekerja, rumah tangga, media, dan geopolitik. Bank sentral disebut independen agar tidak mudah dipaksa membiayai defisit pemerintah atau menahan suku bunga terlalu rendah demi popularitas jangka pendek. Tetapi independensi bukan berarti bebas dari akuntabilitas. Bank sentral harus menjelaskan kebijakan karena dampaknya dirasakan publik.

Federal Reserve pada 17 Juni 2026 menyatakan inflasi masih tinggi relatif terhadap target 2%, sebagian karena guncangan pasokan yang mendorong harga di sektor seperti energi. ([Federal Reserve](#)) ECB pada 11 Juni 2026 memproyeksikan inflasi zona euro rata-rata 3,0% pada 2026, 2,3% pada 2027, dan 2,0% pada 2028, dengan revisi naik terutama akibat jalur harga energi yang lebih tinggi. ([European Central Bank](#)) Bank Indonesia pada Juni 2026 menaikkan BI-Rate menjadi 5,75% untuk memperkuat stabilitas rupiah dan menjaga inflasi dalam sasaran. ([Bank Indonesia](#))

Keputusan-keputusan ini menunjukkan bahwa bank sentral berada dalam medan ketidakpastian. Jika terlalu lambat menaikkan suku bunga, inflasi dan ekspektasi inflasi dapat meningkat. Jika terlalu cepat atau terlalu tinggi menaikkan suku bunga, pertumbuhan dan pekerjaan dapat tertekan. Inilah “politik bank sentral”: bukan politik partai, tetapi politik pilihan kebijakan yang berdampak pada kelompok sosial berbeda.

5. Dilema Moneter dalam Krisis Energi

Krisis energi menimbulkan dilema khusus bagi kebijakan moneter. Bank sentral memiliki instrumen utama berupa suku bunga dan operasi likuiditas. Instrumen itu bekerja terutama melalui permintaan agregat, kredit, nilai tukar, harga aset, dan ekspektasi. Namun krisis energi adalah guncangan sisi penawaran. Ketika pasokan minyak terganggu, menaikkan suku bunga tidak langsung membuka jalur kapal, menambah kilang, atau menciptakan gas baru.

Namun bank sentral tetap harus merespons karena inflasi energi dapat menyebar. Ada tiga saluran utama penyebaran.

Pertama, **pass-through biaya**. Energi mahal menaikkan biaya produksi dan transportasi. Perusahaan menaikkan harga barang dan jasa.

Kedua, **ekspektasi inflasi**. Jika masyarakat yakin harga akan terus naik, mereka mengubah perilaku harga dan upah.

Ketiga, **nilai tukar**. Negara importir energi dapat mengalami tekanan neraca pembayaran, yang melemahkan mata uang dan menambah inflasi impor.

Karena itu, bank sentral tidak menaikkan suku bunga untuk “menurunkan harga minyak” secara langsung. Bank sentral menaikkan suku bunga untuk mencegah inflasi energi berubah menjadi inflasi umum yang menetap. Ini adalah perbedaan penting. Kebijakan moneter tidak mengatasi akar krisis energi, tetapi membatasi efek sekundernya.

Masalahnya, pembatasan efek sekunder itu mahal. Suku bunga tinggi menekan investasi, kredit konsumsi, kredit UMKM, pasar properti, dan belanja pemerintah melalui kenaikan biaya utang. Karena itu, bank sentral sering dituduh “mengorbankan pertumbuhan” demi inflasi. Namun jika inflasi tidak dikendalikan, kelompok miskin juga menjadi korban.

6. Politik Suku Bunga: Siapa Menang, Siapa Menanggung Beban?

Suku bunga bukan sekadar angka teknis. Suku bunga menentukan biaya uang. Ketika suku bunga naik, beberapa pihak diuntungkan dan beberapa pihak terbebani.

Pihak yang relatif diuntungkan adalah penabung, investor obligasi baru dengan kupon lebih tinggi, dan pemegang mata uang yang lebih stabil. Pihak yang terbebani adalah debitur, UMKM yang membutuhkan kredit, rumah tangga dengan cicilan, sektor properti, industri padat modal, dan pemerintah yang harus membayar bunga utang lebih mahal.

Karena itu, setiap keputusan suku bunga memiliki dampak distribusional. Bank sentral sering mengatakan bahwa tujuannya bukan memilih pemenang dan pecundang, tetapi menjaga stabilitas harga. Secara formal benar. Namun secara sosial, dampaknya tidak netral.

Dalam negara berkembang, politik suku bunga lebih rumit karena nilai tukar menjadi saluran penting. Jika bank sentral tidak menaikkan suku

bunga ketika mata uang tertekan, arus modal dapat keluar dan kurs melemah. Pelemahan kurs menaikkan harga impor, termasuk energi dan pangan. Maka, suku bunga menjadi alat menjaga kepercayaan terhadap mata uang.

Bank Indonesia pada Juni 2026 menaikkan BI-Rate untuk memperkuat stabilitas rupiah di tengah ketidakpastian global. ([Bank Indonesia](#)) Keputusan seperti ini menunjukkan bahwa bank sentral negara berkembang sering menghadapi dilema tambahan dibanding bank sentral negara maju: bukan hanya inflasi domestik, tetapi juga stabilitas nilai tukar, arus modal, dan kepercayaan investor.

7. Energi, Pangan, dan Inflasi: Hubungan yang Sering Diremehkan

Harga energi dan harga pangan sangat terkait. Energi diperlukan untuk memproduksi pupuk, mengoperasikan mesin pertanian, mengangkut hasil panen, menjalankan pendingin, mengolah makanan, dan mendistribusikan barang ke pasar. Ketika energi naik, harga pangan dapat ikut naik meskipun produksi pertanian tidak berubah.

World Bank menekankan bahwa kenaikan harga komoditas 2026 didorong oleh energi dan pupuk. ([World Bank](#)) Ini penting karena pupuk adalah input penting bagi pertanian. Jika harga pupuk naik, petani dapat mengurangi penggunaan pupuk, yang menurunkan hasil panen, atau menaikkan harga jual, yang menekan konsumen.

Inflasi pangan memiliki dampak politik lebih kuat daripada inflasi barang mewah. Masyarakat dapat menunda membeli barang tahan lama, tetapi tidak dapat menunda makan. Karena itu, inflasi pangan sering menjadi pemicu ketidakpuasan sosial. Negara-negara dengan sistem perlindungan sosial lemah biasanya lebih rentan terhadap gejolak politik ketika harga pangan naik.

Di Indonesia, harga pangan dan energi sangat sensitif secara politik. Pemerintah sering menggunakan subsidi, operasi pasar, bantuan pangan, cadangan beras, dan pengaturan harga untuk menahan gejolak. Namun intervensi harga memiliki biaya. Jika harga domestik terlalu ditekan, APBN atau BUMN dapat menanggung beban. Jika harga dilepas penuh, rakyat kecil terpukul. Maka, kebijakan pangan dan energi harus dirancang sebagai bagian dari stabilitas makro dan keadilan sosial.

8. Kebijakan Fiskal: Mitra atau Lawan Bank Sentral?

Dalam krisis energi, bank sentral tidak dapat bekerja sendiri. Kebijakan fiskal menentukan apakah tekanan inflasi diperkuat atau dikurangi. Jika pemerintah memberikan subsidi energi luas, inflasi jangka pendek dapat ditekan, tetapi defisit dan beban fiskal meningkat. Jika subsidi dicabut mendadak, inflasi melonjak dan daya beli turun. Jika bantuan sosial tepat sasaran, kelompok rentan dapat dilindungi tanpa membebani APBN secara berlebihan.

Kebijakan fiskal dan moneter dapat saling mendukung atau saling bertabrakan. Jika bank sentral menaikkan suku bunga untuk menahan inflasi, tetapi pemerintah memperluas belanja konsumtif tanpa target jelas, tekanan inflasi dapat bertahan. Sebaliknya, jika pemerintah memperbaiki subsidi, memperkuat pasokan pangan, dan memberi bantuan tepat sasaran, bank sentral tidak perlu menaikkan suku bunga terlalu agresif.

Inilah konsep **policy mix**. Inflasi energi membutuhkan bauran kebijakan. Bank sentral menjaga ekspektasi dan nilai tukar. Pemerintah menjaga pasokan, subsidi tepat sasaran, cadangan pangan, transportasi, dan perlindungan sosial. Regulator energi memperbaiki distribusi. Pemerintah daerah memantau harga lokal. Tidak ada satu lembaga yang dapat menyelesaikan semuanya.

Di banyak negara, masalah muncul ketika pemerintah menekan bank sentral agar menahan suku bunga demi pertumbuhan, sementara

kebijakan fiskal tidak menahan tekanan inflasi. Ini melemahkan kredibilitas bank sentral. Sebaliknya, bank sentral yang terlalu kaku tanpa memperhatikan dampak sosial juga dapat kehilangan legitimasi. Keseimbangan antara independensi dan koordinasi menjadi kunci.

9. Independensi Bank Sentral dan Batas Demokrasi

Independensi bank sentral lahir dari pengalaman bahwa politisi sering memiliki insentif jangka pendek. Menjelang pemilu, pemerintah dapat tergoda menekan suku bunga rendah, memperluas kredit, atau membiayai defisit agar ekonomi terlihat kuat. Jika bank sentral tidak independen, inflasi dapat meningkat dan kepercayaan mata uang turun.

Namun independensi bank sentral juga menimbulkan pertanyaan demokratis: lembaga yang tidak dipilih rakyat membuat keputusan yang memengaruhi pekerjaan, upah, kredit, dan pertumbuhan. Karena itu, independensi harus diimbangi akuntabilitas. Bank sentral harus menjelaskan mandat, model, data, risiko, dan alasan kebijakan.

Independensi bukan berarti bank sentral selalu benar. Sejarah menunjukkan bank sentral bisa terlambat membaca inflasi, terlalu cepat mengetatkan, terlalu optimistis terhadap pasar, atau kurang memperhatikan stabilitas keuangan. Karena itu, transparansi, komunikasi, dan evaluasi publik sangat penting.

Politik bank sentral bukan berarti bank sentral harus tunduk pada partai politik. Politik bank sentral berarti kebijakannya berada dalam ruang nilai publik: stabilitas harga, pekerjaan, nilai tukar, kepercayaan, dan distribusi beban. Semakin besar dampak kebijakan, semakin penting komunikasi yang jujur.

10. Federal Reserve, ECB, Bank of England, dan Bank Indonesia: Respons Berbeda, Dilema Sama

Bank sentral berbeda-beda karena struktur ekonomi dan mandatnya berbeda. Federal Reserve memiliki mandat ganda: stabilitas harga dan maksimum employment. ECB memiliki mandat utama stabilitas harga. Bank of England menjaga inflasi dan stabilitas sistem keuangan. Bank Indonesia menjaga stabilitas rupiah dan mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

Pada Juni 2026, Federal Reserve menyatakan inflasi masih tinggi relatif terhadap target 2%, sebagian dipengaruhi guncangan pasokan energi. ([Federal Reserve](#)) ECB memproyeksikan inflasi zona euro 3,0% pada 2026 dan menyebut harga energi sebagai faktor revisi naik. ([European Central Bank](#)) Bank of England pada Juni 2026 mempertahankan Bank Rate di 3,75%, dengan dua anggota memilih kenaikan 25 basis poin menjadi 4,0%. ([Bank of England](#)) Bank Indonesia menaikkan BI-Rate menjadi 5,75%. ([Bank Indonesia](#))

Respons berbeda ini menunjukkan bahwa tidak ada satu resep universal. Negara dengan mata uang cadangan global seperti Amerika Serikat memiliki ruang kebijakan berbeda dari negara emerging market. Zona euro menghadapi fragmentasi antarnegara anggota dan ketergantungan energi. Inggris menghadapi tekanan inflasi dan pertumbuhan yang rapuh. Indonesia menghadapi inflasi, rupiah, arus modal, subsidi energi, dan kebutuhan pertumbuhan.

Namun dilema dasarnya sama: bagaimana menjaga inflasi tanpa mematikan ekonomi; bagaimana menjaga kredibilitas tanpa mengabaikan masyarakat; bagaimana merespons guncangan energi yang tidak sepenuhnya dapat dikendalikan oleh suku bunga.

11. Krisis Energi dan Negara Berkembang

Negara berkembang lebih rentan terhadap krisis energi karena beberapa alasan. Pertama, porsi energi dan pangan dalam konsumsi rumah tangga lebih besar. Kedua, sistem perlindungan sosial sering belum cukup adaptif. Ketiga, mata uang lebih rentan terhadap arus modal keluar. Keempat,

APBN lebih terbatas. Kelima, ketergantungan impor energi atau pangan dapat memperbesar tekanan. Keenam, kredibilitas kebijakan sering lebih mudah diuji pasar.

Ketika harga energi naik, negara berkembang menghadapi pilihan sulit. Jika harga domestik dinaikkan, masyarakat miskin terpukul. Jika harga ditahan, APBN membengkak. Jika subsidi dibayar melalui utang, risiko fiskal naik. Jika bank sentral menaikkan bunga, pertumbuhan melambat. Jika bunga tidak naik, nilai tukar melemah.

Karena itu, negara berkembang membutuhkan kebijakan yang lebih presisi. Subsidi luas harus diganti bertahap dengan bantuan tepat sasaran. Ketahanan pangan harus diperkuat. Transportasi publik harus dikembangkan. Energi terbarukan harus dipercepat. Cadangan fiskal harus dijaga. Data sosial harus diperbaiki agar bantuan dapat cepat disalurkan.

12. Indonesia: Energi, Rupiah, Subsidi, dan BI-Rate

Indonesia menghadapi dilema khas negara berkembang besar. Pertumbuhan perlu dijaga, tetapi stabilitas rupiah dan inflasi juga harus dipertahankan. Harga energi global memengaruhi APBN melalui subsidi dan kompensasi. Harga energi juga memengaruhi inflasi dan daya beli. Ketika rupiah melemah, biaya impor energi dapat meningkat, yang memperbesar tekanan harga dan fiskal.

Keputusan Bank Indonesia menaikkan BI-Rate menjadi 5,75% pada Juni 2026 dapat dibaca dalam konteks stabilitas nilai tukar dan inflasi. ([Bank Indonesia](#)) Kebijakan ini bukan hanya sinyal moneter, tetapi juga sinyal kepada pasar bahwa bank sentral menjaga kredibilitas rupiah. Namun suku bunga lebih tinggi juga berarti biaya kredit meningkat, sehingga sektor riil membutuhkan dukungan kebijakan lain agar pertumbuhan tidak terlalu tertekan.

Bagi Indonesia, kebijakan energi sangat terkait dengan politik fiskal. Subsidi energi sering dipilih untuk menjaga daya beli dan stabilitas sosial. Namun subsidi luas berisiko tidak tepat sasaran dan membebani APBN. Reformasi subsidi energi secara bertahap menjadi sangat penting, tetapi harus disertai perlindungan sosial dan komunikasi publik yang baik.

Indonesia juga memiliki peluang. Sebagai negara dengan sumber daya energi fosil dan potensi energi terbarukan, Indonesia dapat membangun ketahanan energi jangka panjang melalui diversifikasi: energi surya, panas bumi, hidro, bioenergi, baterai, efisiensi energi, transportasi publik, dan elektrifikasi. Namun transisi energi membutuhkan investasi, teknologi, tata kelola, dan kebijakan harga yang konsisten.

13. Inflasi sebagai Krisis Kepercayaan

Inflasi bukan hanya kenaikan harga; inflasi juga krisis kepercayaan. Uang berfungsi karena masyarakat percaya bahwa nilainya relatif stabil. Jika masyarakat kehilangan kepercayaan pada uang, mereka mempercepat belanja, membeli aset, atau mencari mata uang lain. Dalam situasi ekstrem, inflasi dapat menghancurkan kontrak sosial.

BIS pada 2026 menekankan pentingnya menjaga kepercayaan pada uang dalam konteks inovasi sistem moneter dan keuangan. ([Bank for International Settlements](#)) Meskipun pembahasan BIS tersebut berkaitan dengan inovasi moneter dan stablecoins, prinsipnya relevan: sistem moneter bergantung pada kepercayaan. Bank sentral bukan hanya pengelola suku bunga, tetapi penjaga kepercayaan terhadap uang.

Kepercayaan dibangun melalui kredibilitas. Kredibilitas muncul jika bank sentral konsisten dengan mandatnya, transparan dalam komunikasinya, dan mampu menjelaskan trade-off. Jika bank sentral terlalu sering berubah arah tanpa alasan jelas, pasar dan masyarakat bingung. Jika bank sentral dianggap tunduk pada tekanan politik, ekspektasi inflasi dapat naik.

Namun kepercayaan juga bergantung pada pemerintah. Jika kebijakan fiskal tidak kredibel, bank sentral sulit menjaga stabilitas. Jika subsidi tidak terkendali, defisit membesar. Jika data tidak dipercaya, komunikasi kebijakan melemah. Maka, kepercayaan moneter adalah hasil kerja bersama bank sentral dan pemerintah.

14. Komunikasi Bank Sentral sebagai Instrumen Kebijakan

Dalam ekonomi modern, komunikasi bank sentral adalah instrumen kebijakan. Pernyataan bank sentral dapat menggerakkan pasar sebelum suku bunga berubah. Forward guidance, proyeksi inflasi, konferensi pers, notulen rapat, dan laporan moneter membentuk ekspektasi pelaku ekonomi.

Ketika inflasi energi meningkat, komunikasi menjadi lebih penting. Bank sentral harus menjelaskan apakah inflasi dipandang sementara atau persisten; apakah kebijakan akan ketat atau menunggu data; apakah fokus pada headline inflation atau core inflation; apakah nilai tukar menjadi perhatian; dan bagaimana bank sentral membaca risiko pertumbuhan.

Komunikasi yang buruk dapat memperburuk volatilitas. Jika bank sentral terlalu optimistis, masyarakat dapat menilai bank sentral tidak serius. Jika terlalu hawkish, pasar dapat panik. Jika terlalu teknis, publik tidak mengerti. Jika terlalu politis, kredibilitas turun.

Bank sentral harus berbicara kepada dua audiens sekaligus: pasar keuangan dan masyarakat luas. Pasar membutuhkan sinyal yang presisi. Masyarakat membutuhkan penjelasan yang sederhana: mengapa harga naik, mengapa suku bunga naik, dan bagaimana kebijakan melindungi daya beli dalam jangka menengah.

15. Krisis Energi dan Transisi Energi: Paradoks Kebijakan

Krisis energi sering membuat negara kembali ke energi fosil demi keamanan pasokan. Ketika harga gas naik, beberapa negara menghidupkan kembali batu bara. Ketika harga minyak naik, pemerintah memberi subsidi BBM. Ketika listrik mahal, transisi energi dapat dianggap terlalu mahal. Ini menciptakan paradoks: krisis energi dapat memperlambat transisi energi, padahal ketergantungan energi fosil adalah salah satu sumber kerentanan.

Namun krisis energi juga dapat mempercepat transisi. Harga energi fosil yang tinggi membuat energi terbarukan lebih menarik. Negara terdorong membangun efisiensi energi, kendaraan listrik, transportasi publik, penyimpanan energi, dan diversifikasi pasokan.

Kuncinya adalah desain kebijakan. Jika subsidi energi fosil dipertahankan luas, sinyal harga untuk efisiensi dan energi bersih melemah. Jika subsidi dicabut tanpa perlindungan sosial, masyarakat terdampak. Maka, transisi energi harus adil: kelompok rentan dilindungi, pekerja sektor energi lama diberi pelatihan, daerah penghasil energi dibantu diversifikasi, dan investasi energi bersih dipercepat.

Bank sentral juga mulai memperhatikan risiko iklim dan energi terhadap stabilitas keuangan. Namun bank sentral tidak dapat menggantikan kebijakan energi. Pemerintah harus memimpin transisi energi melalui regulasi, investasi, harga karbon, insentif, infrastruktur, dan riset.

16. Politik Inflasi: Antara Rakyat, Pasar, dan Pemerintah

Inflasi selalu menjadi isu politik karena memengaruhi kehidupan sehari-hari. Rakyat menilai ekonomi bukan dari model makro, tetapi dari harga beras, minyak goreng, transportasi, listrik, gas, dan biaya sekolah. Jika harga naik lebih cepat daripada pendapatan, masyarakat merasa ekonomi memburuk meskipun PDB tumbuh.

Pemerintah cenderung ingin menahan harga karena inflasi tinggi merusak popularitas. Bank sentral ingin menjaga ekspektasi inflasi. Pasar ingin kebijakan kredibel. Pelaku usaha ingin kepastian biaya. Pekerja ingin upah naik mengikuti harga. Semua kepentingan ini bertemu dalam politik inflasi.

Masalahnya, tidak semua cara menahan harga sehat. Price cap dapat menahan inflasi sementara, tetapi menciptakan kelangkaan jika harga terlalu rendah. Subsidi dapat menahan harga, tetapi membebani fiskal. Impor pangan dapat menurunkan harga konsumen, tetapi merugikan petani jika tidak dikelola baik. Kenaikan suku bunga dapat menahan inflasi, tetapi menekan kredit.

Karena itu, politik inflasi membutuhkan kejujuran publik. Pemerintah harus menjelaskan bahwa tidak ada kebijakan tanpa biaya. Yang penting adalah membagi biaya secara adil dan memilih instrumen yang paling tepat sasaran.

17. Tiga Skenario Global

Skenario 1: Energi Mereda, Inflasi Turun Bertahap

Dalam skenario optimistis, konflik geopolitik mereda, pasokan energi pulih, harga minyak turun, dan inflasi kembali mendekati target pada 2027. Bank sentral dapat berhenti menaikkan suku bunga dan mulai menurunkannya secara hati-hati. Pertumbuhan global membaik, dan tekanan fiskal berkurang.

Skenario 2: Energi Volatil, Inflasi Bertahan

Dalam skenario moderat, harga energi tidak terus melonjak, tetapi tetap volatil. Inflasi turun lambat. Bank sentral mempertahankan suku bunga tinggi lebih lama. Pemerintah menanggung beban subsidi dan perlindungan sosial. Pertumbuhan tidak jatuh, tetapi tetap tertahan.

Skenario 3: Krisis Energi Berkepanjangan dan Inflasi Mengakar

Dalam skenario buruk, pasokan energi terganggu lebih lama, harga pangan dan pupuk naik, ekspektasi inflasi meningkat, nilai tukar negara berkembang tertekan, dan bank sentral harus menaikkan suku bunga lebih agresif. Pertumbuhan melemah dan risiko sosial meningkat. IMF dalam skenario adverse menggambarkan bahwa gangguan energi yang lebih besar dapat menaikkan inflasi dan memperketat kondisi keuangan. ([IMF](#))

18. Agenda Kebijakan untuk Indonesia

Pertama, **jaga kredibilitas Bank Indonesia**. Stabilitas rupiah dan inflasi adalah fondasi kepercayaan. Namun kebijakan moneter harus terus dikomunikasikan secara jelas agar publik memahami alasan kenaikan atau penurunan suku bunga.

Kedua, **reformasi subsidi energi secara bertahap dan adil**. Subsidi luas harus bergeser menjadi bantuan tepat sasaran, transportasi publik, efisiensi energi, dan investasi energi bersih.

Ketiga, **perkuat perlindungan sosial adaptif**. Ketika harga energi dan pangan naik, bantuan harus cepat sampai kepada kelompok rentan.

Keempat, **bangun ketahanan pangan dan pupuk**. Inflasi energi sering merembes ke pangan. Pemerintah perlu memperkuat produksi pangan, distribusi, cadangan, dan efisiensi pupuk.

Kelima, **diversifikasi energi nasional**. Indonesia perlu mempercepat energi terbarukan, panas bumi, surya, hidro, bioenergi, penyimpanan energi, dan elektrifikasi transportasi.

Keenam, **perkuat koordinasi fiskal-moneter**. Bank sentral tidak boleh dibiarkan bekerja sendiri. Pemerintah harus menjaga defisit, kualitas belanja, dan pasokan barang strategis.

Ketujuh, **tingkatkan transparansi harga dan data**. Data energi, pangan, subsidi, stok, impor, dan distribusi harus terbuka agar kebijakan dipercaya.

Kedelapan, **lindungi UMKM dari tekanan biaya**. UMKM rentan terhadap kenaikan energi dan bunga. Dukungan pembiayaan produktif dan efisiensi energi perlu diperkuat.

Kesembilan, **gunakan APBN secara presisi**. Belanja harus menahan guncangan sosial tanpa menciptakan beban fiskal permanen yang tidak terkendali.

Kesepuluh, **percepat transisi energi berkeadilan**. Krisis energi harus menjadi momentum mengurangi ketergantungan pada energi fosil impor dan memperkuat kemandirian energi.

19. Kesimpulan

Krisis energi, inflasi global, dan politik bank sentral menunjukkan bahwa ekonomi modern sangat saling terhubung. Guncangan di jalur minyak, konflik geopolitik, harga gas, pupuk, dan pangan dapat merambat menjadi inflasi global. Inflasi kemudian memaksa bank sentral mengambil keputusan sulit: menaikkan suku bunga untuk menjaga kredibilitas, tetapi dengan risiko menekan pertumbuhan dan kredit.

Bank sentral penting, tetapi tidak maha kuasa. Ia dapat menjaga ekspektasi inflasi, nilai tukar, dan kepercayaan terhadap uang, tetapi tidak dapat sendirian menyelesaikan krisis energi. Karena itu, respons terhadap inflasi energi membutuhkan bauran kebijakan. Kebijakan moneter menjaga kredibilitas. Kebijakan fiskal melindungi kelompok rentan. Kebijakan energi memperbaiki pasokan dan diversifikasi. Kebijakan pangan menjaga distribusi. Kebijakan sosial memastikan beban tidak jatuh pada rakyat miskin.

Bagi Indonesia, krisis energi global adalah peringatan bahwa stabilitas makro, ketahanan energi, subsidi tepat sasaran, dan transisi energi tidak dapat dipisahkan. Keputusan Bank Indonesia menaikkan BI-Rate menjadi 5,75% pada Juni 2026 adalah respons terhadap tekanan stabilitas rupiah

dan inflasi, tetapi keberhasilan mengelola inflasi tidak hanya bergantung pada BI. ([Bank Indonesia](#)) Pemerintah, BUMN energi, regulator, daerah, pelaku usaha, dan masyarakat harus berada dalam kerangka kebijakan yang terkoordinasi.

Kesimpulan utama artikel ini adalah bahwa inflasi energi adalah persoalan ekonomi-politik. Ia tidak cukup dijawab dengan model moneter, tetapi juga membutuhkan keadilan sosial, tata kelola energi, transparansi fiskal, dan legitimasi publik. Bank sentral menjaga nilai uang, tetapi negara secara keseluruhan harus menjaga nilai kehidupan rakyat.

Glossarium

Bank Sentral

Lembaga yang mengelola kebijakan moneter, stabilitas harga, stabilitas nilai tukar, dan stabilitas sistem keuangan.

BI-Rate

Suku bunga kebijakan Bank Indonesia yang menjadi sinyal arah kebijakan moneter nasional.

Core Inflation / Inflasi Inti

Inflasi yang mengeluarkan komponen harga yang sangat bergejolak, seperti energi dan pangan, untuk melihat tekanan harga yang lebih mendasar.

Ekspektasi Inflasi

Perkiraan masyarakat, pelaku usaha, dan pasar mengenai inflasi masa depan.

Energy Shock / Guncangan Energi

Perubahan mendadak dalam harga atau pasokan energi yang memengaruhi ekonomi luas.

Forward Guidance

Komunikasi bank sentral mengenai arah kebijakan masa depan untuk membentuk ekspektasi pasar.

Headline Inflation

Inflasi keseluruhan yang mencakup seluruh komponen harga, termasuk energi dan pangan.

Inflasi Global

Kenaikan harga umum yang terjadi secara luas di banyak negara, sering dipengaruhi oleh komoditas, energi, pangan, dan rantai pasok.

Kebijakan Fiskal

Kebijakan pemerintah terkait pajak, belanja, subsidi, defisit, dan utang.

Kebijakan Moneter

Kebijakan bank sentral yang mengatur suku bunga, likuiditas, nilai tukar, dan stabilitas harga.

Krisis Energi

Kondisi ketika pasokan energi terganggu, harga energi melonjak, atau sistem energi tidak mampu memenuhi kebutuhan ekonomi secara stabil dan terjangkau.

Policy Mix

Kombinasi kebijakan moneter, fiskal, struktural, dan sektoral untuk mencapai tujuan ekonomi.

Quasi-Fiscal Cost

Biaya kebijakan yang menyerupai beban fiskal tetapi tidak selalu tercatat langsung dalam APBN, misalnya melalui BUMN atau subsidi tersembunyi.

Second-Round Effects

Dampak lanjutan inflasi awal, misalnya kenaikan energi yang kemudian mendorong kenaikan upah dan harga barang lain.

Stabilitas Harga

Kondisi ketika inflasi rendah, stabil, dan dapat diprediksi.

Subsidi Energi

Dukungan pemerintah untuk menahan harga energi agar lebih terjangkau bagi masyarakat.

Transisi Energi

Peralihan dari sistem energi berbasis fosil menuju energi rendah karbon dan terbarukan.

Volatilitas Harga

Fluktuasi harga yang cepat dan tidak stabil.

Daftar Pustaka

Alesina, A., & Summers, L. H. (1993). Central bank independence and macroeconomic performance: Some comparative evidence. *Journal of Money, Credit and Banking*, 25(2), 151–162. doi:10.2307/2077833

Ball, L. (1994). What determines the sacrifice ratio? *Monetary Policy*, 155–193.

Bank Indonesia. (2026). *BI-Rate naik 25 bps menjadi 5,75%*. Bank Indonesia.

Barro, R. J., & Gordon, D. B. (1983). Rules, discretion and reputation in a model of monetary policy. *Journal of Monetary Economics*, 12(1), 101–121. doi:10.1016/0304-3932(83)90051-X

Bernanke, B. S. (2022). *21st century monetary policy: The Federal Reserve from the Great Inflation to COVID-19*. W. W. Norton.

Blanchard, O. J., & Galí, J. (2007). The macroeconomic effects of oil shocks: Why are the 2000s so different from the 1970s? *NBER Working Paper No. 13368*. doi:10.3386/w13368

Borio, C. (2014). Monetary policy and financial stability: What role in prevention and recovery? *BIS Working Papers No. 440*. Bank for International Settlements.

Clarida, R., Galí, J., & Gertler, M. (1999). The science of monetary policy: A New Keynesian perspective. *Journal of Economic Literature*, 37(4), 1661–1707. doi:10.1257/jel.37.4.1661

European Central Bank. (2026). *Monetary policy decisions, June 2026*. ECB.

Federal Reserve. (2026). *Federal Reserve issues FOMC statement, June 17, 2026*. Board of Governors of the Federal Reserve System.

Friedman, M. (1968). The role of monetary policy. *American Economic Review*, 58(1), 1–17.

Hamilton, J. D. (1983). Oil and the macroeconomy since World War II. *Journal of Political Economy*, 91(2), 228–248. doi:10.1086/261140

International Energy Agency. (2026). *Oil Market Report: June 2026*. IEA.

International Monetary Fund. (2026). *World Economic Outlook, April 2026*. IMF.

Kydland, F. E., & Prescott, E. C. (1977). Rules rather than discretion: The inconsistency of optimal plans. *Journal of Political Economy*, 85(3), 473–491. doi:10.1086/260580

Mishkin, F. S. (2007). *Monetary policy strategy*. MIT Press.

OECD. (2026). *OECD Economic Outlook, Interim Report March 2026*. OECD Publishing.

Rogoff, K. (1985). The optimal degree of commitment to an intermediate monetary target. *Quarterly Journal of Economics*, 100(4), 1169–1189.

doi:10.2307/1885679

Sargent, T. J. (1982). The ends of four big inflations. In R. E. Hall (Ed.), *Inflation: Causes and effects* (pp. 41–97). University of Chicago Press.

Svensson, L. E. O. (1997). Inflation forecast targeting: Implementing and monitoring inflation targets. *European Economic Review*, 41(6), 1111–1146.

doi:10.1016/S0014-2921(96)00055-4

Taylor, J. B. (1993). Discretion versus policy rules in practice. *Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy*, 39, 195–214.

doi:10.1016/0167-2231(93)90009-L

World Bank. (2026). *Commodity Markets Outlook 2026*. World Bank.

Copilot for this article: ChatGPT, Access date: 24 June 2026. Author's account ([Rudy C Tarumingkeng](#)). <https://chatgpt.com/c/6a388ad7-46fc-83ec-b5c6-bc3ad53631f7>